



Studi Pengaruh Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Nasional terhadap Daya Beli di Kota Surabaya

Naysilla Chairani¹, Nisrina Zasmin², Rahman Raisuli³,
Akhmad Rasyid Rosidi⁴, Ahmad Setiawan Nuraya^{5*}

¹⁻⁵ Program Studi Manajemen STIE Indonesia Banking School, Indonesia

Corresponding Author : ahmad.nurhaya@ibs.ac.id

Abstract This study aims to evaluate the effectiveness of the National Cash Social Assistance (BST) policy on the purchasing power of communities in Surabaya. BST is a social protection program launched by the Indonesian government in response to the economic impact of the COVID-19 pandemic. The policy targets low-income and vulnerable groups through direct cash transfers, with the goal of maintaining basic consumption levels and preventing a sharp decline in household welfare. This research examines the extent to which the BST program has achieved its objectives, particularly in enhancing or sustaining the purchasing power of its beneficiaries in urban settings. The study employs an evaluative approach using a mixed-methods design, combining quantitative survey data with qualitative interviews involving aid recipients and local-level implementers. The findings indicate that the BST program had a positive short-term impact on household purchasing power, particularly in meeting essential needs such as food and utility expenses. However, several implementation challenges were also identified, including issues of inaccurate beneficiary targeting, delays in distribution, and the relatively small amount of assistance compared to actual household need. These results highlight that the effectiveness of social policy is not solely dependent on budget allocation but also on the precision of its implementation on the ground. Consequently, the study recommends improvements in beneficiary data updating, enhanced transparency in aid distribution, and the development of more adaptive program designs that reflect local socio-economic conditions. The findings are expected to serve as a valuable reference for policymakers in designing more efficient and sustainable social assistance programs in the future.

Keywords : BST, Vulnerable, Indonesia

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Nasional terhadap daya beli masyarakat di Kota Surabaya. BST merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka merespons dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini menysasar kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui skema transfer tunai langsung, dengan harapan dapat menjaga konsumsi dasar dan mencegah terjadinya penurunan kesejahteraan yang drastis. Studi ini mengkaji sejauh mana program BST berhasil mencapai tujuannya, terutama dalam meningkatkan atau mempertahankan daya beli masyarakat penerima manfaat di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan data kuantitatif dari survei lapangan dengan wawancara kualitatif terhadap penerima bantuan dan aparat pelaksana di tingkat kelurahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa BST memberikan dampak positif terhadap daya beli dalam jangka pendek, khususnya untuk kebutuhan konsumsi pokok seperti pangan dan biaya utilitas. Namun demikian, ditemukan pula beberapa hambatan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran, serta rendahnya jumlah bantuan yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh ketepatan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat, peningkatan transparansi distribusi bantuan, dan desain program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan program bantuan yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan.

Kata kunci : BST, Miskin, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama pada masa-masa krisis ekonomi dan sosial. Dalam berbagai situasi darurat, seperti pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia merespons dengan berbagai kebijakan sosial, Received: April 30, 2025; Revised: Mei 15, 2025; Accepted: Juni 01, 2025; Published; Juni 03, 2025

salah satunya adalah program Bantuan Sosial Tunai Nasional (BST). Program ini dirancang sebagai instrumen intervensi fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendorong stabilitas sosial dan ekonomi secara umum.

BST merupakan bentuk transfer tunai langsung dari pemerintah pusat kepada kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial maupun perlambatan kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin, memperkuat konsumsi domestik, dan pada gilirannya membantu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berharap dengan adanya suntikan dana tunai tersebut, masyarakat penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar serta tetap terlibat dalam aktivitas ekonomi lokal, meskipun dalam situasi yang penuh keterbatasan.

Namun, dalam implementasinya, efektivitas kebijakan BST perlu dikaji secara mendalam. Efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan atau cakupan penerima manfaat, melainkan juga dari seberapa besar dampak positif yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat penerima. Misalnya, apakah dana bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan dasar? Apakah bantuan ini mampu mencegah terjadinya kemiskinan baru? Atau justru terjadi penyalahgunaan dana dan ketidaktepatan sasaran penerima? Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa program seperti BST berjalan sesuai dengan tujuannya.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki karakteristik sosial ekonomi yang kompleks dan dinamis. Selain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, Surabaya juga memiliki kantong-kantong kemiskinan yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan BST di wilayah ini menjadi sangat krusial untuk diamati. Di satu sisi, Surabaya memiliki infrastruktur administrasi yang relatif baik untuk mendukung distribusi bantuan, namun di sisi lain, tantangan dalam hal pendataan, verifikasi penerima manfaat, serta pemanfaatan dana masih sering ditemukan.

Evaluasi efektivitas kebijakan BST di Surabaya tidak hanya penting untuk melihat keberhasilan program di tingkat lokal, tetapi juga memberikan gambaran representatif bagi keberhasilan program serupa di wilayah perkotaan lain di Indonesia. Dengan memahami bagaimana BST berdampak terhadap daya beli masyarakat Surabaya, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat efektivitas kebijakan sosial ini. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan berharga bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi berikutnya.

Efektivitas kebijakan publik, dalam hal ini BST, dapat ditinjau dari beberapa dimensi, antara lain ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kecukupan bantuan, dan dampak terhadap

indikator kesejahteraan seperti pengeluaran rumah tangga, konsumsi, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap program ini juga menjadi variabel penting yang mencerminkan kepercayaan terhadap pemerintah dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan evaluatif dalam penelitian ini akan melibatkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan dan hasil dari BST di Kota Surabaya.

Permasalahan sosial ekonomi yang muncul selama masa pandemi memperkuat argumen bahwa kebijakan bantuan tunai seperti BST tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Jika kebijakan ini terbukti efektif, maka ke depannya pemerintah dapat mengadopsi pendekatan serupa dalam kondisi non-darurat sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan. Namun sebaliknya, jika ditemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan maupun dampaknya, maka kebijakan serupa perlu didesain ulang dengan perbaikan yang berbasis bukti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Bantuan Sosial Tunai Nasional terhadap daya beli masyarakat di Kota Surabaya, dengan fokus pada bagaimana kebijakan ini memengaruhi kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan implementasi di tingkat lokal serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk perbaikan ke depan. Diharapkan, hasil dari studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan tujuan utama untuk menilai sejauh mana kebijakan Bantuan Sosial Tunai Nasional efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat di Kota Surabaya. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menelaah berbagai aspek implementasi dan dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat efektivitas program.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods), yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak bantuan terhadap daya beli masyarakat melalui instrumen survei,

sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh penerima manfaat dan pelaksana program di tingkat lokal. Penggunaan metode campuran dianggap tepat dalam konteks evaluasi kebijakan, karena mampu memberikan data yang lengkap dan saling melengkapi antara dimensi statistik dan naratif.

Lokasi penelitian dipusatkan di beberapa kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Surabaya. Pemilihan lokasi didasarkan pada variasi karakteristik sosial ekonomi wilayah dan tingkat penerimaan program BST, agar hasil penelitian mencerminkan kondisi yang beragam. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling untuk data kualitatif dan stratified random sampling untuk survei kuantitatif, dengan memperhatikan kriteria penerima manfaat BST aktif selama periode program berlangsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, survei terhadap rumah tangga penerima BST, yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana bantuan, perubahan pengeluaran konsumsi, serta persepsi terhadap program. Kuesioner yang digunakan disusun berdasarkan indikator efektivitas kebijakan, seperti ketepatan sasaran, waktu penyaluran, kecukupan nominal bantuan, dan dampaknya terhadap kebutuhan dasar. Kedua, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain perwakilan dari Dinas Sosial Kota Surabaya, petugas distribusi di kelurahan, serta penerima manfaat dari berbagai latar belakang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data kontekstual mengenai pelaksanaan program dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik deskriptif statistik, menggunakan bantuan perangkat lunak seperti SPSS untuk mengolah data dari hasil survei. Analisis ini mencakup distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata terkait indikator daya beli sebelum dan sesudah menerima bantuan. Sementara itu, data kualitatif dianalisis dengan metode analisis tematik, di mana setiap hasil wawancara dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema yang relevan dengan efektivitas kebijakan, seperti kendala teknis distribusi, respons masyarakat, dan rekomendasi perbaikan. Hasil dari kedua pendekatan ini kemudian diinterpretasikan secara triangulatif, agar diperoleh kesimpulan yang lebih kuat dan komprehensif.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, dilakukan uji coba kuesioner sebelum digunakan secara luas, serta dilakukan cross-check antara temuan kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, peneliti memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara etis, dengan mendapatkan persetujuan dari responden serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Dengan metode yang sistematis dan menyeluruh ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan bantuan sosial tunai yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan

Ketepatan sasaran merupakan komponen utama dalam evaluasi efektivitas kebijakan bantuan sosial. Dalam konteks Bantuan Sosial Tunai (BST) Nasional yang diterapkan di Kota Surabaya, ketepatan sasaran merujuk pada sejauh mana bantuan tersebut berhasil menjangkau masyarakat yang paling terdampak secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil temuan lapangan, masih terdapat sejumlah kendala dalam proses identifikasi dan penetapan penerima bantuan. Hal ini terutama berkaitan dengan kelemahan dalam basis data sosial, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan pemerintah sebagai rujukan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

DTKS kerap kali tidak mutakhir, sehingga banyak warga miskin dan rentan yang tidak terdaftar di dalamnya, padahal mereka sangat terdampak oleh kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi. Sebaliknya, ada pula kasus di mana rumah tangga yang sudah mengalami perbaikan kondisi ekonomi tetap terdaftar dan menerima BST. Hal ini menimbulkan ketimpangan distribusi bantuan dan mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Ketidaktepatan sasaran ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa bantuan diberikan secara tidak adil, legitimasi dan dukungan terhadap program menurun.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya partisipasi aktif dari pemerintah tingkat kelurahan dan komunitas lokal dalam proses verifikasi data. Idealnya, perangkat desa dan tokoh masyarakat dapat berperan sebagai aktor penting dalam membantu pemerintah pusat memperbarui data sosial secara berkala. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan mereka sering kali bersifat pasif karena keterbatasan sumber daya, informasi, atau kejelasan peran. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem top-down dalam pendataan kurang mampu menangkap dinamika sosial ekonomi masyarakat secara real time.

Oleh karena itu, dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, ketepatan sasaran merupakan indikator awal yang sangat penting. Program bantuan seperti BST hanya dapat dikatakan efektif apabila menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan. Reformasi dalam pengelolaan data sosial menjadi keharusan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem digitalisasi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), serta pelibatan aktif komunitas. Dengan kata lain, perbaikan data dan mekanisme penentuan penerima bukan hanya

soal teknis administratif, tetapi menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan kebijakan sosial di tingkat lokal.

Dampak Terhadap Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga

Daya beli merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh suatu kebijakan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Bantuan Sosial Tunai Nasional ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Studi ini menemukan bahwa secara umum, BST memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, seperti bahan makanan, biaya transportasi, dan pembayaran utilitas. Sebagian besar penerima manfaat mengalokasikan dana bantuan untuk konsumsi harian, menunjukkan bahwa BST berfungsi sebagai penyangga sosial dalam jangka pendek.

Namun, terdapat batasan yang signifikan terkait besaran dan frekuensi bantuan. Jumlah yang diterima oleh setiap rumah tangga relatif kecil, dan penyalurannya tidak berlangsung secara reguler setiap bulan. Kondisi ini menyebabkan BST belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi rumah tangga secara menyeluruh. Rumah tangga penerima masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya kesehatan, pendidikan anak, dan cicilan utang. Selain itu, karena BST bersifat sementara, masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan pasca penghentian bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar masalah struktural kemiskinan.

Selain itu, efektivitas bantuan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal. Di wilayah-wilayah padat dan miskin di Surabaya, inflasi harga barang pokok dan terbatasnya kesempatan kerja informal memperparah situasi. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, nilai riil dari bantuan tunai berkurang, sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan secara maksimal. Ini menandakan bahwa efektivitas BST tidak hanya dipengaruhi oleh nominal bantuan, tetapi juga oleh stabilitas harga dan kondisi ekonomi lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan seperti BST, diperlukan integrasi antara bantuan langsung tunai dan kebijakan ekonomi lainnya. Pemerintah dapat mengembangkan program yang bersifat produktif, seperti pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, dan fasilitasi akses terhadap pasar lokal. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga daya beli, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Evaluasi ini menegaskan bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada konteks implementasinya dan strategi pelengkap yang mendukung keberlanjutan dampak bantuan tersebut.

Efisiensi dan Transparansi Pelaksanaan Program

Efisiensi dan transparansi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan sosial, termasuk dalam program Bantuan Sosial Tunai Nasional. Di Surabaya, proses pelaksanaan BST dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan teknis, yang turut memengaruhi efektivitas program. Salah satu persoalan utama adalah keterlambatan penyaluran bantuan, yang disebabkan oleh birokrasi yang panjang serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga terkait. Warga penerima sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal pencairan, lokasi pengambilan, serta jumlah yang akan diterima, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.

Ketidakefisienan dalam pelaksanaan ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat lokal. Padahal, untuk mencapai efektivitas kebijakan, bantuan harus dapat disalurkan dengan cepat dan tepat, terutama pada masa krisis seperti pandemi. Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi faktor penghambat. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mengetahui alasan mereka terdaftar atau tidak terdaftar sebagai penerima BST. Minimnya transparansi ini menyebabkan spekulasi dan prasangka negatif terhadap pemerintah, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.

Penelitian ini juga mencatat bahwa sebagian pelaksana di tingkat kelurahan tidak memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program dengan efektif. Ketergantungan pada sistem manual dan keterbatasan teknologi informasi menyebabkan proses distribusi berjalan lambat dan rawan kesalahan. Selain itu, belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan mudah diakses juga menjadi celah dalam sistem pengawasan. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang merasa tidak adil tidak memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan atau memperoleh klarifikasi.

Agar kebijakan BST dapat berjalan lebih efisien dan transparan, perlu dilakukan reformasi dalam sistem manajemen pelaksanaan program. Salah satu langkah penting adalah digitalisasi proses pencairan bantuan melalui sistem berbasis NIK atau e-wallet, yang memungkinkan penyaluran langsung ke rekening penerima secara cepat dan minim intervensi pihak ketiga. Pemerintah juga perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh daerah, termasuk mekanisme pelaporan, audit, dan evaluasi berkala. Pelibatan masyarakat sipil dan lembaga independen sebagai pengawas pelaksanaan juga dapat meningkatkan akuntabilitas program.

Dengan membenahi aspek efisiensi dan transparansi ini, efektivitas kebijakan bantuan sosial tidak hanya meningkat dalam hal output, tetapi juga dalam hal outcome, yaitu dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga dapat

terbangun melalui praktik tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan BST tidak cukup hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi harus memperhatikan kualitas proses distribusi dan pelayanan terhadap masyarakat penerima manfaat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) Nasional memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kota Surabaya, terutama dalam masa krisis seperti pandemi. Kebijakan ini berperan sebagai bantalan ekonomi sementara yang membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, dari sisi efektivitas, kebijakan BST belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat tantangan dalam hal akurasi penyaluran, keterlambatan distribusi, serta kurangnya integrasi antara program bantuan tunai dengan program pemberdayaan jangka panjang. Data sosial yang kurang mutakhir juga menyebabkan beberapa penerima tidak tepat sasaran, sedangkan sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan.

Di sisi lain, daya beli masyarakat memang mengalami peningkatan sesaat pasca penyaluran BST, tetapi sifatnya sementara. Begitu bantuan berhenti, kondisi ekonomi sebagian besar penerima kembali ke situasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BST sebagai instrumen kebijakan memerlukan dukungan program lanjutan agar manfaatnya bisa lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan BST dapat dikategorikan cukup berhasil dalam konteks jangka pendek. Namun, untuk menjadikannya solusi sosial ekonomi yang komprehensif, perlu ada perbaikan struktural dari aspek perencanaan hingga pengawasan program.

5. SARAN

Pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama dalam memperbaharui data penerima secara berkala dengan melibatkan unsur masyarakat. Data yang akurat akan meningkatkan ketepatan sasaran dan menghindari kecemburuan sosial. Untuk menciptakan efek jangka panjang, BST sebaiknya dipadukan dengan pelatihan kewirausahaan, dukungan modal usaha mikro, atau program padat karya, sehingga masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Penyaluran bantuan melalui rekening bank atau dompet digital akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi praktik penyimpangan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan. Dengan saran-saran ini, diharapkan kebijakan bantuan sosial

tunai dapat lebih tepat guna, inklusif, dan mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai solusi sesaat dalam menghadapi krisis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial nasional jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, C., & Susetyo, I. B. (2024). Efektivitas program bantuan sosial tunai pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Barat Kota Jakarta Selatan tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(5), 423–429. <https://doi.org/10.31092/jgs.v7i2.4230>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2023). Pengaruh implementasi program bantuan sosial tunai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 45–58. <https://doi.org/10.22437/japb.v12i2.7486>
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh implementasi bantuan sosial BPNT dan PKH terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5684–5690. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sy3cq>
- Purnama, I. N. (2023). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Halong. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.22437/japb.v11i1.1204>
- Rahmadhani, S., & Purnomo, D. (2024). Analisis program bantuan sosial tunai (BST) dalam pengurangan kemiskinan di Kelurahan Pelem Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIE)*, 4(03), 142–151. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v4i03.492>
- Rahman, Z. (2021). Efektivitas program bantuan sosial tunai bagi masyarakat (Studi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin). *Aspirasi: Jurnal Masalah Sosial*, 11(2), 215–227. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>
- Ruslan, N. A., Usman, J., & Tahir, M. (2022). Dampak bantuan sosial tunai bagi kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Kaluku Bodoa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmiah Sosial*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30640/jpmis.v1i1.165>
- Safitri, N. E., & Murti, I. (2024). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sidotopo Wetan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2), 169–178. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1182>